

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari daerah provinsi, kabupaten dan juga kota. Pada tahun 1998, telah terjadi pergantian sistem pemerintahan Orde Baru menjadi Pemerintah Reformasi. Pada masa reformasi, kehidupan ketatanegaraan dan kebijakan ekonomi telah mengalami banyak perubahan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah pusat melimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mendukung dan mewujudkan keinginan pemerintah pusat, agar masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah. Adanya otonomi daerah dapat dinilai sebagai suatu cara yang efektif dalam melaksanakan pemerataan pembangunan di setiap daerah.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemimpin daerah memiliki kedudukan untuk memajukan daerahnya dengan cara mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dengan membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Keberhasilan otonomi daerah dapat dinilai dari bagaimana kemampuan suatu bidang keuangan dalam membiayai urusan pemerintah. Keuangan merupakan indikator penting dalam mendukung kemampuan otonomi daerah, dengan menggunakan uang yang memadai untuk suatu pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat maka akan menciptakan pemerintah yang efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan daerah. Pemerintah daerah

memiliki kewenangan mengelola dalam keuangan yang dimiliki daerah yang dilakukan secara merata, logis, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada umum dalam setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Pelaksanaan roda pemerintahan, pemerintah daerah dengan pusat memiliki hubungan yang erat, yaitu adanya dana perimbangan antara pusat dan daerah yang telah diatur berdasarkan Undang-undang No 33 tahun 2004, dengan adanya dana perimbangan tersebut akan saling menentukan keberhasilan roda pemerintahan, sehingga pemerintah daerah telah memiliki ruang untuk mengatur dan menggali potensi kekayaan yang dimiliki daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengolah keuangan, sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019. Aspek manajemen keuangan daerah dapat melihat sampai sejauh mana kekayaan daerah yaitu PAD digali oleh pemerintah. Keterampilan pemerintah untuk mengolah keuangan daerah dapat terlihat dari kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun pada satu periode anggaran tertentu dan dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, hal tersebut berfungsi untuk menggambarkan kapabilitas pemerintah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah serta mengembangkan potensi yang dimiliki.

Daerah dapat dikatakan berhasil melaksanakan otonomi daerah jika daerah tersebut memiliki kemampuan dari segi keuangan. Kemandirian keuangan daerah dapat membantu pemerintah menjadi mandiri dalam proses pembangunan daerah dan tidak terjadinya ketergantungan secara terus-menerus kepada pemberian

pemerintah pusat. Supaya daerah mandiri dalam segi keuangan maka harus mengoptimalkan dan menggali kekayaan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Persoalan kemandirian keuangan menjadi suatu tantangan bagi seluruh daerah otonom, karena besarnya pelayanan publik tidak sebanding dengan penerimaan keuangan daerah. Maka peningkatan pendapatan asli daerah harus dioptimalkan agar penerimaan pendapatan daerah dapat mencukupi pembiayaan pembangunan daerah serta meminimalisir pemberian dana dari pemerintah pusat.

Kabupaten Bandung merupakan suatu daerah otonomi dari Provinsi Jawa Barat, yang diberikan kekuasaan secara luas dan diberikan tanggungjawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan terhadap perkembangan daerahnya. Kabupaten Bandung memiliki potensi atau sumber-sumber daerah yang tersembunyi dan bisa dikelola dengan baik. Setiap daerah diharapkan mampu dan mandiri dari segi keuangannya, untuk mencapai kemampuan tersebut diharapkan pendapatan asli daerah harus memiliki peran yang dominan dari pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, hal tersebut merupakan salah satu dari tujuan otonomi daerah. Namun yang terjadi pada Kabupaten Bandung yaitu selama periode tahun anggaran 2014 sampai 2018 sumber dana pendapatan masih didominasi dari dana transfer.

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang didapatkan oleh peneliti dari data prapenelitian yang dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) pemerintah Kabupaten Bandung yaitu:

**Tabel 1.1****Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung 2014-2018**

Tahun	Sumber Pendapatan Daerah			
	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer Pusat +Provinsi(Rp)	Lain-Lain Pendapatan yang Sah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)
2014	702.045.372.759,08	3.092.824.175.044,00	243.908.277.984,00	4.038.777.825.787,08
2015	784.216.215.215,60	3.691.408.918.460,00	1.192.458.160,00	4.476.817.591.835,60
2016	856.514.244.254,37	3.751.155.128.639,00	-	4.607.669.372.893,37
2017	936.905.730.680,24	3.541.990.387.713,00	602.364.179.262,00	5.081.260.297.655,24
2018	927.543.321.132,26	3.666.263.710.871,00	666.167.779.366,00	5.259.974.811.369,26

Sumber: LRA Kabupaten Bandung tahun 2014-2018 (data diolah peneliti)

Dapat diketahui dari tabel di atas bahwa Kabupaten Bandung selama lima tahun memiliki sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer merupakan sumber acuan untuk melihat tingkat kemandirian keuangan daerah. Dilihat dari data sumber pendapatan tersebut bahwa yang mendominasi pendapatan daerah yaitu bersumber dari pendapatan transfer jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah pada tahun 2014 sebesar Rp 702.045.372.759,08 sedangkan pendapatan transfer sebesar Rp3.092.824.175.460,00 yang berkontribusi kepada pendapatan daerah sebesar 76%, tahun 2015 pendapatan asli daerah Rp 784.216.215.215,60 sedangkan pendapatan transfer Rp 3.691.408.918.460,00 berkontribusi kepada daerah sebesar 82%, tahun 2016 pendapatan asli daerah sebesar Rp 856.514.244.254,37 sedangkan pendapatan transfer Rp 3.751.155.128,639,00 dan

memberikan kontribusi kepada daerah sebesar yaitu 81%, tahun 2017 pendapatan asli daerah sebesar Rp936.905.730.680,24 sedangkan pendapatan transfer Rp 3.541.990.387.713,00 memberikan kontribusi kepada daerah yaitu 69% pada tahun ini pendapatan transfer mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kemudian tahun 2018 pendapatan asli daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu Rp927.543.321.132,26 sedangkan untuk transfer naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 3.666.263.710.871,00 dan memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah sebesar 69%. Dilihat dari kontribusi pendapatan transfer kepada pendapatan daerah selama lima tahun tersebut bahwa pendapatan transfer mengalami naik turun yaitu rata-rata berada >50% menggambarkan bahwa pendapatan transfer memberikan kontribusi yang sangat dominan kepada daerah dan dapat dikatakan bahwa daerah tersebut masih adanya ketergantungan kepada pusat, sedangkan jika kontribusi pendapatan transfer semakin kecil atau pendapatan asli daerah semakin tinggi yaitu pada tahap batas minimum 100% maka akan dikatakan efektif dan dapat mendorong kemampuan daerah kabupaten Bandung tanpa adanya ketergantungan secara terus-menerus kepada pusat.

Dengan melihat dari gambaran tentang perkembangan keuangan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer di Kabupaten Bandung selama tahun anggaran 2014-2018, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul:

**TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DALAM  
MENDUKUNG OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014-2018.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, terlihat adanya masalah yang berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Bandung bahwa peran pemerintah pusat dalam segi keuangan masih menonjol atau mendominasi dibandingkan dari pada peran pendapatan asli daerah atau peran pemerintah daerah itu sendiri.

1. Pendapatan daerah di dominasi oleh pendapatan transfer
2. Pendapatan transfer pusat dan provinsi memiliki peran yang sangat tinggi
3. Pada Tahun 2014-2018 Daerah Kabupaten Bandung masih ketergantungan terhadap pusat
4. Ketergantungan Pemerintah daerah kepada pusat masih tinggi
5. Kinerja keuangan pendapatan asli daerah masih rendah dibandingkan dengan pendapatan transfer pusat

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Bandung berdasarkan analisis rasio keuangan daerah?
2. Faktor hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah?
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang berdasarkan dari rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Bandung berdasarkan analisis rasio keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui faktor hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti menggolongkan manfaat penelitian menjadi dua, yakni secara teoritis dan praktis.

##### **1. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan konsep atau teori-teori pemerintahan khususnya pada kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan daerah dan efektivitas pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi penulis, penelitian ini dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik, dapat menambah wawasan mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah.
- b. Bagi pemerintah, diharapkan dapat dijadikan tolak ukur atau acuan pemerintah dalam menganalisis kinerja keuangan, dan dapat menjadikan

bahan informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan mengenai keuangan daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung.

- c. Bagi umum, peneliti berharap penelitian yang akan dilaksanakan ini dapat bermanfaat dalam bidang keilmuan dan sebagai informasi bagi orang-orang yang membutuhkan informasi terkait masalah yang peneliti teliti.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Konsep kerangka pemikiran yang peneliti gunakan adalah konsep deduktif yaitu dari umum ke khusus yang dimulai dari *Grand Theory* yaitu Administrasi Publik, *Midle Theory* yaitu Keuangan daerah (APBD) dan otonomi daerah, *Operational Theory* yaitu kemandirian keuangan daerah.

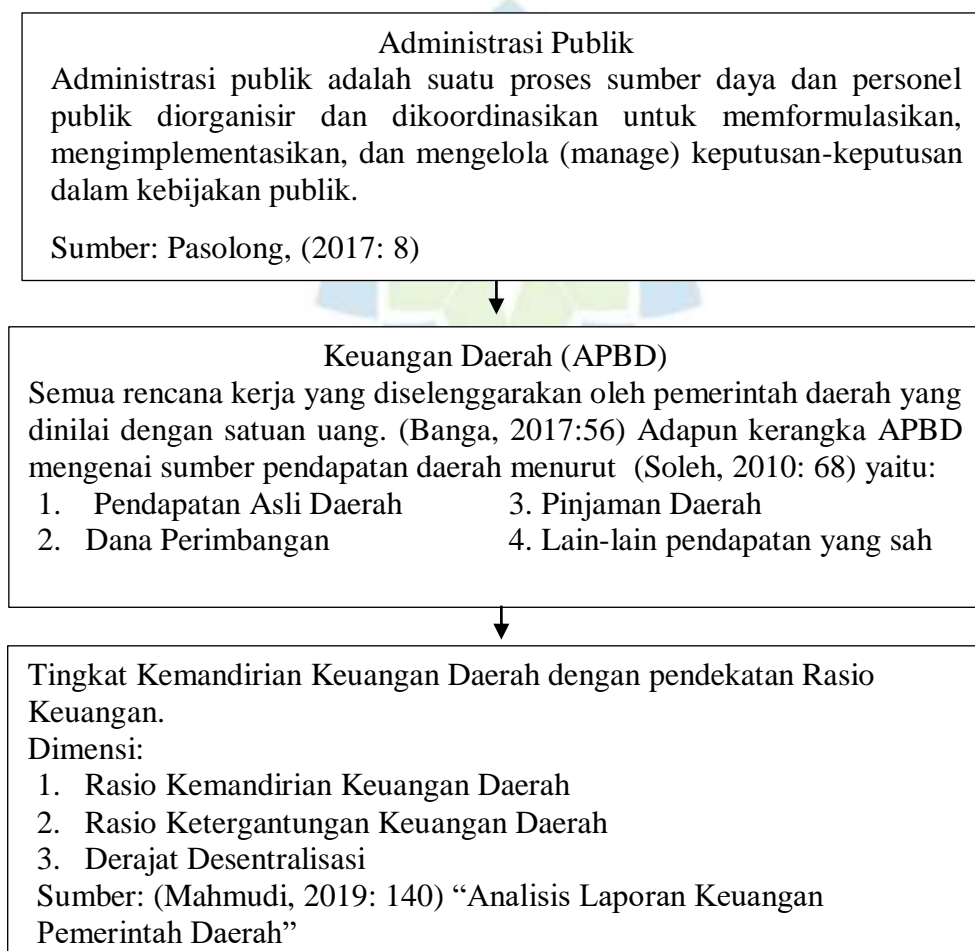
*Grand Theory* yang peneliti gunakan adalah teori Menurut Chandler & Plano dalam Keban yang dikutip dalam buku Harbani Pasolong (2017:8), mengatakan bahwa administrasi publik adalah suatu proses sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Adapun *Midle Theory* yang peneliti gunakan adalah keuangan daerah (APBD) Banga (2017: 56) bahwa keuangan daerah APBD yaitu semua rencana kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinilai dengan satuan uang.



Untuk *operasional Theory*, peneliti menggunakan teori rasio keuangan menurut Mahmudi (2019:140) rasio keuangan yang digunakan untuk meneliti tentang kemandirian keuangan daerah terdiri dari rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan derajat desentralisasi. Bahwa kemandirian keuangan daerah yaitu untuk mengukur kemampuan dalam membiayai urusan pemerintah dengan membandingkan PAD dan transfer dari pusat.

Penelitian ini dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran berikut ini:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### **G. Proposisi**

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian, tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Bandung dalam mendukung otonomi daerah tahun 2014-2018 akan optimal apabila berdimensi rasio kemandirian keuangan, rasio ketergantungan, rasio derajat desentralisasi.

